

Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014

Zulkifli Umar

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

zulkfli.um@gmail.com

Abstrak, penelitian ini dilakukan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2014 apakah telah efektif atau tidak dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh yang meliputi data realisasi anggaran tahun 2014. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh merupakan salah satu lembaga instansi pemerintah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang jalan dan jembatan Provinsi Aceh yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam proses pencairan anggaran dan pelaksanaan anggaran dimulai dengan tahap proses persiapan, tahap proses pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,62% atau Rp. 669.552.780.744,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 685.848.490.825. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh telah efektif yaitu dengan tercapainya tingkat realisasi anggaran lebih dari 90%. Dan hal ini sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Kata kunci: Realisasi anggaran, pembangunan, jalan dan jembatan

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai produk di era reformasi telah menandai dimulainya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan kewenangan luas pada daerah kabupaten dan kota, daerah kabupaten dan kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonomi yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Bina Marga merupakan salah satu lembaga instansi pemerintah sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah yang terbagi ke dalam 6 bidang, diantara

nya : Bidang Kesekretariatan, Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Pengujian dan Peralatan, dan UPTD. Dinas Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah juga mempunyai hak kewenangan dan kewajiban sebagai daerah otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan yang ada pada Dinas tersebut. Tujuan dari Dinas Bina Marga adalah untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja, melakukan pengawasan, memberi izin dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan jalan dan jembatan pada Pemerintah Aceh. Sejauh ini tujuan dari Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh masih jauh dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Pemerintah Aceh. Sementara itu Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh merupakan instansi daerah dibidang pembangunan jalan dan jembatan, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Dinas yang bersangkutan untuk mengelola apa-apa yang menjadi tanggungjawabnya sendiri.

Pada tahun 2014 realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan masuk kedalam kategori efektif meskipun tidak mencapai 100%. Hal ini terjadi pada prosedur pencairan dana di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Aceh dilakukan oleh bagian keuangan. Bagian keuangan memulai proses pencairan dana anggaran sebesar Rp. 685.848.490.825 dengan melihat hasil laporan realisasi anggaran dana sebesar Rp.669.552.780.744, dengan tingkat realisasi 97,62% dan sisa tingkat realisasi 2,38%. Pencairan dana tidak dapat dicairkan karena tidak sesuai dengan prosedur pencairan dana yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi pada realisasi anggaran karena adanya pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah disusun sebelumnya. Setiap Dinas yang merupakan lembaga instansi pemerintahan memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap perkembangan yang ada didalam lembaga tersebut, salah satunya harus memenuhi kebutuhan gaji pegawai, sekretariat, belanja barang dan jasa, kegiatan belanja modal dan lainnya, sehingga setiap kebutuhannya dapat terpenuhi. Untuk memenuhi semua unsur tersebut, maka anggaran yang diterima dari pemerintah provinsi harus disalurkan untuk melaksanakan kegiatan didalam Dinas sebagai lembaga instansi pemerintah. Menurut Bustami dan Nurlaila (2011:1), Anggaran adalah pernyataan pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran yang disusun dan digunakan mempunyai peran penting terutama untuk tindakan perbaikan. Sedangkan Mardiasmo (2011:61), menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan (Ali Hasan, 2012:239). Realisasi anggaran mengacu pada beberapa variabel dalam penggunaannya, diantaranya jumlah anggaran yang tersedia, penggunaan anggaran, dan sisa anggaran yang merupakan keuangan daerah yang harus ditelusuri dalam penggunaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Realisasi Anggaran, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi digunakan untuk membayar

utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Menurut Darise (2011:239) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding menyajikan antara anggaran dana realisasinya yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya anggaran, maka Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh sebagai suatu lembaga instansi pemerintahan harus dapat mengelola anggaran dengan efektif yaitu secara proporsional dan jelas.

Tinjauan

Aktivitas dalam suatu perusahaan tak lepas dari yang namanya akuntansi. Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur dan jalannya perusahaan, terutama masalah siklus, prosedur, dan sistem yang diterapkan di perusahaan terkait dengan keluar masuknya asset, kewajiban, dan modal yang mereka miliki. Setiap perusahaan pun memiliki kebijakan dan prosedur masing-masing terkait dengan pengaplikasian sistem, dan cara pencatatan yang dilakukan. Dan itupun tak lepas dari konsep dasar yang namanya akuntansi. Oleh karena itu, banyak pandangan dan pengertian para ahli berkenaan dengan istilah akuntansi. Ada yang mengatakan akuntansi adalah seni. Ada yang bilang akuntansi adalah prosedur. Dan ada juga yang mengatakan akuntansi adalah serangkaian cara atau sistem. Terlepas dari semuanya itu, berikut saya paparkan definisi dan pengertian akuntansi menurut para ahli.

Definisi Akuntansi menurut *American Institute of Certified public Accountants (AICPA)* yang kiranya dapat menjadi landasan yang kuat sebagai langkah awal mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi yaitu “*Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial character and interpreting the result there of*”. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai mata uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Seni pencatatan artinya dalam melakukan pencatatan diusahakan serapi mungkin, dengan menggunakan bahasa yang khas dalam akuntansi dan teknik tertentu sehingga menarik dan mudah dipahami oleh para pemakai sedangkan teknik pengelompokan dan pengikhtisaran dilakukan menurut aturan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sedangkan menurut *American Accounting Association (AAA)* definisi akuntansi ialah “*Accounting is the process communicating economic information to permit in formed judgments and decision by user of the information*”. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi/mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Mengidentifikasi artinya mencari atau menentukan identitas transaksi ekonomi untuk kepentingan pengambilan keputusan . Mengukur artinya memberikan

penilaian yang dinyatakan dengan uang. Mengkomunikasikan artinya hasil informasi yang berupa laporan keuangan serta analisisnya dapat dipakai untuk pengambilan keputusan manajemen.

Sejalan dengan pendapat tersebut *Lapoliwo* dan *Daniel KS* (2012:2) mengatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya mempunyai sifat keuangan serta penginterperstasian hasil pencatatan tersebut. Menurut *Sugiri* dan *Riyono* (2011:1) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam pengambilan pilihan-pilihan peralasan dari berbagai tindakan alternatif.

Selanjutnya *Rudianto* (2013:4) mengartikan akuntansi sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan-tindakan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan dan mengandung dua hal:

1. Akuntansi memberikan jasa, maksudnya kita harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada (misalnya: sumber daya alam, tenaga kerja dan kekayaan keuangan) dengan bijaksana sehingga kita dapat memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, semakin baik sistem akuntansi yang mengukur dan melaporkan biaya penggunaan sumber daya tersebut, maka akan semakin baik juga keputusan yang di ambil untuk mengalokasikannya.
2. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang di gunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat perhitungan. Sehingga informasi masa lalu yang disediakan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi masa mendatang. Pada umumnya tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hasil dari proses akuntansi yang berbentuk laporan keuangan yang diharapkan dapat membantu bagi pemakai informasi keuangan.

Selanjutnya para akuntan mendefinisikan anggaran seperti yang disebutkan oleh *Bustami* dan *Nurlaila* (2011:1) Anggaran adalah pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran yang disusun dan digunakan dalam perusahaan mempunyai peran penting terutama untuk tindakan perbaikan. Selanjutnya menurut *Garrison* (2012:4) anggaran merupakan rencana terinci yang menunjukkan bagaimana sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran menggambarkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif formal.

Anggaran juga merupakan dasar dalam pengambilan keputusan sehingga dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Didalam prosesnya untuk menghasilkan suatu produk dan jasa diperlukan biaya yang sangat besar. Seluruh biaya tersebut dikeluarkan terlebih dahulu yang disusun dalam bentuk rencana dan dituangkan

dalam suatu anggaran bahan baku yang proses anggarannya menjadi suatu pedoman bagi perusahaan dalam proses produksinya. Anggaran dalam hal ini adalah anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh.

Proses penganggaran organisasi dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Dalam upaya untuk mencapai tujuannya, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi utama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Menurut Rudianto (2013:5) fungsi anggaran meliputi dari beberapa hal, yaitu:

1. perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak yang diupayakan untuk direalisasikan, memberi saran, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode tertentu.
2. Pengorganisasian (*organizing*), setelah semua rencana ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menggerakkan (*actuating*), setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.
4. Pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak.

Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau suatu pengantar manajemen yang digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen telah baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Bastian (2011:191) fungsi anggaran sektor publik adalah meliputi:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cerak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar komunikasi atasan dan bawahan
4. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrument publik
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal

Menurut Bastian (2011:66), prinsip penyusunan anggaran (APBD/APBA) di Indonesia pada umumnya berlaku sama, yaitu:

1. Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamika. Penyusunan APBA haruslah sesuai dan mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran
2. Prinsip disiplin anggaran, setiap Dinas/Lembaga hendaknya menggunakan anggaran secara efektif, tepat guna, serta memiliki efisiensi waktu dalam melaksanakannya

3. Prinsip kemandirian, mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain.
4. Prinsip prioritas, pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan di daerah
5. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas, efisiensi merupakan pembelanjaan anggaran secara cermat yaitu dengan penggunaan anggaran secara minimum untuk pencapaian hasil yang optimum. Dan efektifitas merupakan penggunaan anggaran yang tepat yaitu perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Arif (2012:16) klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci, maka klasifikasi anggaran dibagi kedalam beberapa bagian, diantaranya :

1. Berdasarkan Objek. Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari atas penerimaan pajak. Pendapatan lainnya adalah pendapatan hibah dan sebagainya, sedangkan belanja diklasifikasikan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan sebagainya.
2. Berdasarkan Organisasi. Anggaran diklasifikasikan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian, efisiensi, dan efektifitasnya, serta untuk melihat pengalokasian anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional.
3. Berdasarkan Fungsi. Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja Negara seperti dalam sector pendidikan, sektor social, dan lain sebagainya.
4. Berdasarkan Sifat/Karakter. Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin (*current*), serta pendapatan dan belanja pembangunan (*Capital Expenditures*).
5. Berdasarkan Kehematan. Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya, yaitu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kebijakan nasional.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran sebagai rincian pengeluaran yang ada dalam setahun. Menurut Mahsun (2011:83) proses penyusunan anggaran terdiri dari:

1. Tahap Persiapan. Anggaran (*Budget Preparation*). Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan melakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat, dan harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*). Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran, yang melihat proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan dituntut harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas pertanyaan dan bantahan dari pihak legislative.
3. Tahap Implementasi Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementing*). Dalam tahap ini manajer keuangan publik harus memperhatikan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen, dan kemungkinan pada tahap ini terjadinya perubahan anggaran pada periode anggaran.

4. Tahap Pelaporan dari Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*). Dalam tahap ini diharapkan tidak akan menemukan banyak masalah, karena sebelumnya telah dilakukan penilaian dari aspek akuntabilitas dan implementasi dengan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian yang baik. Maka diharapkan tahap *Budget Reporting and Evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah.

Dalam satu tahun anggaran, penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program, atau kegiatan ini dikaitkan dengan kebijakan program komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Jangka waktu pelaksanaannya serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Mardiasmo (2011:62) proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja, sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Aspek penganggaran dipandang sebagai isu sentral, dan bila dipandang dari sisi waktu aspek akuntansi lebih bersifat *Retrospective* (Pencatatan pada masa lalu), maka aspek penganggaran lebih bersifat perencanaan masa depan.

Menurut Mardiasmo (2011:61) faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor lainnya dengan munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan social politik, bencana alam dan lain sebagainya.

Rudianto (2013:7) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran antara lain:

1. Tingkat kesulitan anggaran.
2. Partisipasi dari manajemen puncak.
3. Keadilan.
4. Kesulitan departemen anggaran.
5. Struktur organisasi.
6. Sumber daya perusahaan.

Proses penyusunan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan didalam perusahaan dan kebutuhan di lapangan, dimana dalam menyusun anggaran harus diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia, mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan

keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program dan kegiatan tersebut.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Anggaran

Ditingkat nasional, penentuan prioritas-prioritas anggaran dan negoisasi alokasi anggaran yang digunakan sangat tersentralisasi. Ditingkat nasional biasanya terdapat sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proposal anggaran untuk pengeluaran masing-masing bidang fungsional pemerintah. Mereka memperoleh proposal untuk pendanaan seluruh departemen menurut fungsi dan membuat skala prioritas anggaran. Desentralisasi beberapa keputusan tentang alokasi sumber daya pada tingkat provinsi, kabupaten kotamemberi arti bahwa proses anggaran harus mampu untuk mengakomodasi pemain-pemain baru, yaitu pemerintah dan legislatif tingkat daerah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Eksekutif, secara umum eksekutif bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan Undang-undang Negara. Eksekutif bertanggung jawab untuk merancang anggaran, membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan Negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang Negara.
2. Legislatif, legislatif membuat dan mengesahkan Undang-undang serta megawasi kerja eksekutif. Legislatif mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran, tetapi tidak membuat ulang anggaran, melainkan hanya dengan mengubah pembelanjaan dalam anggaran. Legislatif bertanggung jawab menentukan visi, misi dan tujuan seta kebijakan dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkar nasional maupun didaerah. Tanggung jawab utamanya adalah merumuskan strategi ditingkat nasional dan ditingkat daerah, hingga tingkat daerah, sehingga legislatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap anggaran provinsi maupun daerah.
3. Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam anggaran diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi bukan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat langsung menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah.

Suatu anggaran merupakan titik focus keseluruhan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran membantu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang menyangkut tentang anggaran dan pendapatan belanja Negara.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dilingkungan pemerintah disebut qanun. Dari beberapa definisi di atas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pembangunan kapabilitas dan efektifitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang. Sumber pembangunan ukuran-ukuran untuk evaluasi kerja. Alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja yang dilakukan selama satu tahun.

Realisasi Anggaran

Realisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Realisasi diartikan sebagai proses pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan. Didalam istilah yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Menurut Bastian (2011:61) ‘Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Sedangkan menurut Krajewski dan Ritsman dalam Bastian (2011:62) ‘realisasi anggaran adalah arahan atau pengendalian secara sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa’. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Realisasi tersebut dapat tercermin dari laporan kinerja yang mengikhtisarkan serta menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Metode

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1, Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, di mana peneliti berusaha mencari dan memberi gambaran tentang suatu masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah menyangkut dengan realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dibedakan atas dua bagian yang meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh tentang realisasi anggaran pada

tahun anggaran 2014. Serta perbandingan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Data Sekunder yaitu data yang telah diperoleh dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh dalam bentuk jadi tanpa ada perubahan, dapat berupa gambaran umum Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh, qanun yang mengatur tentang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh, prosedur pengajuan anggaran, tahapan dalam pengajuan anggaran, struktur organisasi dan fungsi serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh.

Pengumpulan data penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang diambil langsung dari lapangan, yang dalam hal ini adalah pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh. Metode yang digunakan adalah :
 - a. Metode Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan agar mendapat data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang akan dilaksanakan.
 - b. Metode Wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pada bagian pembukuan dan bagian keuangan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh.
2. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, agar dapat menjadi bahan antara penelitian di kepustakaan.

Analisa data ini dilakukan melalui metode deskriptif yaitu mengelola data dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang keadaan yang sedang diselidiki apakah penetapan realisasi anggaran pada dinas tersebut sudah sesuai dengan teori yang berlaku atau belum, fungsi realisasi anggaran, dan problematika realisasi anggaran. Metode analisa data yang penulis gunakan bersifat kualitatif yaitu membandingkan antara data lapangan dengan data dari kepustakaan landasan teoritis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran-saran yang sifatnya dapat membantu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam objek penelitian. Dan untuk melihat tingkat efektivitas anggaran digunakan rumus efektivitas yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Miles dan Huberman dalam Sunandar (2012) yaitu:

$$Ef = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan : Ef = Efektivitas
R = Realisasi Anggaran
T = Anggaran yang tersedia

Menurut Mahmudi (2013:180) dalam mengatur tingkat selisih anggaran baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran, harus diketahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target dan tingkat efisiensi belanja, sehingga besaran nominal selisih anggaran dengan realisasi dapat dinilai signifikan atau tidak. Maka nilai untuk mengukur efektivitas dapat dikategorikan yaitu Sangat Efektif (100%), Efektif (90% - 99%), Cukup Efektif (80% - 89,9%, Kurang Efektif (60% - 79,9%), dan Tidak Efektif (< 60%).

Hasil Penelitian

Realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan. Yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dengan melihat berapa anggaran yang diperlukan untuk belanja satu tahun pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir yang dibutuhkan. Setiap kantor dinas memiliki regulasi sebagai wujud kebijakan yang ada pada kantor dinas dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada atau akan timbul nantinya.
2. Tahap Proses Pelaksanaan Anggaran yaitu melakukan kegiatan realisasi anggaran yang akan dilihat pada laporan realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun 2014.

Berdasarkan lampiran 1 dapat digambarkan bahwa anggaran SKPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun 2014 yang diteliti memiliki anggaran sebesar Rp. 685.848.490.825 dengan tingkat penggunaan anggaran sebesar Rp. 669.552.780.744 atau sebesar 97,62% dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tersebut mengalami kelebihan anggaran yang tidak terpakai (surplus) sebesar Rp. 16.295.710.081 atau sebesar 2,38%.

Realisasi anggaran yang mampu dihabiskan oleh Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh untuk berbagai program dan kegiatan SKPA diantaranya adalah untuk kegiatan belanja tidak langsung yaitu dengan jumlah Rp. 3.098.208.244 atau 91,93% yang terdiri dari gaji pegawai sebesar Rp. 2.217.000.000 atau 94,04%. Dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 881.208.244 atau 86,62% dan kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 682.750.282.581 atau 97,84%. Yang terdiri dari jumlah belanja sebesar Rp. 611.633.959.100 dan belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 71.116.323.481.

Tabel 4.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga Tahun 2014

Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)			Realisasi (%)
	Anggaran	Realisasi	Selisih Anggaran	
1. Jumlah Belanja Modal	611,633,959,100	595,352,748,500	16,281,210,600	97.34
2. Jlh Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	71,116,323,481	71,101,824,000	14,499,481	99.98
Belanja Langsung (A)	682,750,282,581	666,454,572,500	16,295,710,081	97.61
Belanja Pegawai	2,217,000,000	2,217,000,000	0	100.00
Belanja Barang Dan Jasa	881,208,244	881,208,244	0	100.00
Belanja Tidak Langsung (B)	3,098,208,244	3,098,208,244	0	100.00
Jumlah (A + B)	685,848,490,825	669,552,780,744	16,295,710,081	97.62

(Sumber: data diolah (2015))

Maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh, penggunaan anggaran yang ada ternyata efektif dalam penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dari

tingkat persentase surplus yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang tersedia, dimana pada tahun 2014 realisasi anggaran mencapai target anggaran yaitu diatas 90 persen. Dan surplus yang diperoleh pada tahun 2014 akan dibuat dokumen perubahan pelaksana anggaran (DPPA) untuk program-program yang belum dilaksanakan. Dan apabila pada akhir tahun Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh juga masih mengalami surplus maka akan dilaporkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi (DPKAP) untuk dibuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran berjalan untuk direncanakan penggunaannya kedalam program kegiatan tahun selanjutnya.

Proses Pelaksanaan Program pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh

Dalam melaksanakan program pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Tahap Persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim, dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja, maka diperoleh hasil bahwa program pembangunan jalan dan jembatan baik dikota maupun di daerah, pembentukan tim dipilih berdasarkan dengan bidangnya masing-masing untuk mengawasi, memberi izin, menjalankan, dan memantau persiapan pelaksanaan program pembangunan tersebut. Dan yang melaksanakannya tetap dari tenaga kerja pada dinas itu sendiri. Sehingga terjadinya pembagian kerja yang merata dan sesuai dengan aturan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh. kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara garis besar antara lain:
 - a. Peningkatan Jalan.
 - b. Pelebaran Jalan.
 - c. Pengkerasan Jalan.
 - d. Pembangunan Jalan dan Hotmix Jalan.
 - e. Pengaspalan Jalan.
 - f. Terobosan Jalan.
 - g. Pembukaan Jalan.
 - h. Pembangunan Jembatan.
 - i. Rehab Jembatan.
 - j. Dan Pengadaan Rangka Baja.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan yaitu pada pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan untuk mengawasi keadaan yang terjadi dilapangan, apabila ada kekeliruan dan kesalahan dilapangan maka tim dibidang tersebut akan turun tangan untuk menangani hal tersebut.

Tahap Penyelesaian Kegiatan Akhir yang telah dilaksanakan. Diperoleh hasil pembuatan laporan akhir yaitu membuat laporan administrasi nasional dan perbaikan kesalahan pada tanggal 15 Desember sampai dengan berakhirnya setiap kegiatan yang ada pada tanggal 28 Desember dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan pada Bulan Januari, sehingga dapat terselesaikannya laporan akhir tahun pada awal periode Bulan Januari dan melakukan pencocokan dengan bidang akuntansi untuk melihat kebenaran data-data yang diinput.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh tentang proses pencairan anggaran, proses realisasi anggaran dan pelaksanaan program anggaran disampaikan bahwa bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh terlebih dahulu mempersiapkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat program dan kegiatan SKPA yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk tahun yang direncanakan yang dirinci sampai dengan rincian objek belanja, pembiayaan, serta perkiraan untuk tahun berikutnya. Hal ini sehubungan dengan pendapat Mardiasmo (2013:62) dalam proses anggaran yang harus dilakukan yaitu melaksanakan tujuan dan target yang hendak dicapai, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Dalam proses pencairan anggaran menunjukkan bahwa Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh telah bersungguh-sungguh dalam mengelola anggaran dengan efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang dilihat dari hasil kerjanya dalam menggunakan anggaran yang telah disediakan.

Berdasarkan data tingkat realisasi anggaran yang diperoleh dilapangan, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 ini tingkat realisasi anggaran pada belanja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh sebesar 97,62%. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Ukuran Efektivitas Anggaran

Efektivitas	Nilai Persentase
Sangat Efektif	100%
Efektif	90% - 99%
Cukup Efektif	80% - 89,9%
Kurang Efektif	60% - 79,9%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber : Mahmudi (2013)

Pada tabel 5.1 Tentang Ukuran Efektivitas Anggaran diatas, dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 97,62% menunjukkan bahwa kinerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh telah efektif dengan mencapai target lebih dari 90% yang juga ditandai dengan pencapaian yang tidak melampaui batas anggaran yang ada. Seluruh sumber-sumber program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumentasi Pelaksana Program (DPA) semuanya tercapai.

Adapun problematika realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014 tidak mencapai 100% dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah disusun sebelumnya yaitu Pembangunan Jalan Seurafon – Lewak – Sibigo (Otsus Aceh), Nomor Kontrak : 119-AC/BANG/BM/APBA/2014, Tgl. Kontrak : 24 Juni 2014, dengan Masa Pelaksanaan selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari dari tanggal 19 Juni 2014 s/d 30 Desember 2014, yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga

perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut mendapatkan sanksi pemutusan kontrak dan diblack list selama 2 (dua) tahun.

Kinerja belanja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh secara umum juga menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai dengan belanja realisasi anggaran menurut program SKPA yang dibawah jumlah yang dianggarkan. Hal ini juga menunjukkan adanya efisiensi anggaran yaitu sehubungan dengan pendapat Bastian (2011:178) dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, yaitu menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas. Kinerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh juga berhasil menekan defisit anggaran, sehingga pada tahun anggaran 2014 mengalami surplus anggaran. Sehubungan dengan pendapat dari Mahmudi (2013:180) surplus anggaran merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran dengan tingkat realisasinya sebesar antara 97,34% sampai dengan 99,98% dengan surplus mencapai 0,02% sampai dengan 2,66%. Maka secara keseluruhan kinerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun 2014 dinilai bagus, baik dari sisi belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal ini sehubungan dengan pendapat Nordiawan (2011:48) anggaran sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan suatu ukuran yang menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh yang telah disusun sebagaimana mestinya, terlebih dahulu diserahkan kebagian akuntansi/keuangan untuk melihat kecocokan dan kebenaran data yang ada. Sehubungan dengan pendapat Mahsun (2011:158) pada tahap implementasi pelaksanaan anggaran dimana para manajer keuangan harus memperhatikan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen. Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran anggaran yang tersedia dengan melakukan taksiran anggaran secara lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan program semuanya dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada dan rencana-rencana yang telah disusun, sehubungan dengan pendapat Nordiawan (2011:48) anggaran merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk :

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan sebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaan.
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat perencanaan strategis.

Maka hal ini dapat dilihat bahwa kinerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, pengkerasan dan pembukaan badan jalan dan jembatan pada tahun 2014 dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dan dalam tahap penyelesaian kegiatan akhir yang telah dilaksanakan disiapkan laporan akhir pada akhir Bulan Desember dan menyerahkan laporan akhir manajer keuangan pada awal Bulan Januari. Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian (2011:15) laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan sebagai pelaksana otonomi daerah Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina

Marga Pemerintah Aceh menerima anggaran dari pemerintah provinsi untuk kepentingan dinas sendiri.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 669.552.780.744, atau sebesar 97,62%. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 685.848.490.825. Dengan surplus anggaran sebesar Rp. 16.295.710.081 atau sebesar 2,38%. Dengan demikian realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh adalah efektif dalam penggunaan anggaran, dikarenakan pada tahun anggaran 2014 target yang dicapai adalah lebih dari 90% dari target yang ingin dicapai dan direncanakan. Dengan demikian dapat disarankan (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh sebagai lembaga pelayanan masyarakat harus mampu menampung masukan dan pendapat dari masyarakat daerah maupun kota mengenai pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada Provinsi Aceh. (2) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh harus terus berupaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja untuk masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Arif, B. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Z. (2011). *Intermediate Accounting (8th ed.)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Bastian, I (2011). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (4th ed.)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi sektor publik)*. Gorontalo: Indeks.
- Garrison, R. H. (2012). *Akuntansi Manajemen (Manajerial Accounting)*. Terjemahan Bambang Purnomosidhi dan Erwan Dukat. Yogyakarta: AK Group.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi. (6th ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres
- Mahsun, M. dkk. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munandar, M. (2011). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Penerbit: BPEE Yogyakarta.
- Nordiawan, D. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- Rudianto. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Sugiri, R. (2011). *Akuntansi Pengantar 1 (8th ed.)*. STIM YKPN. Yogyakarta.